



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Realisasi belanja kementerian buruk
Tanggal : Rabu, 10 Juli 2013
Surat Kabar : Republika
Halaman : 14

JULI 2013						
M	S	S	R	K	J	S
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	(10)	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

KLIPING BERITA PERISTIWA DPR RI			
Bisnis Indonesia	Indo Pos	Jakarta Post	Kompas
Koran Tempo	Media Indonesia	Pelita	Rakyat Merdeka
Republika	Septu Indonesia	Suara Karya	Suara Pembaruan

Hari: 14

Realisasi Belanja Kementerian Buruk

■ Muhammad Iqbal

Kementerian Keuangan mempermudah prosedur pencairan anggaran.

JAKARTA — Realisasi belanja kementerian dan lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sampai dengan semester I 2013 baru mencapai 26,2 persen. Langkah pemberian sanksi dan hadiah kepada kementerian tak efektif membaik kementerian memperbaiki diri.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan realisasi belanja pemerintah hanya Rp 163 triliun dari pagu Rp 622 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan semester I 2012 yang mencapai 29,96 persen atau Rp 164,2 triliun dari pagu Rp 547,9 triliun. Chatib menjelaskan, daya serap nasional secara kumulatif sebesar 26,3 persen sampai 47,4 persen. Terdapat 40 kementerian dan lembaga (46,5 persen) yang memiliki daya serap anggaran lebih tinggi dari daya serap nasional, antara lain, Badan Pusat Statistik, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Kementerian Kesehatan.

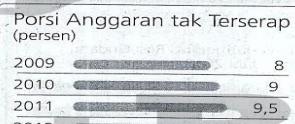
Kemudian, 25 kementerian dan lembaga (29,1 persen) dengan daya serap sejang atau sebesar 20–26,2 persen. Di antaranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara, 21 kementerian lainnya berdaya serap rendah, antara lain, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Meskipun demikian, Chatib mempertirakar, realisasi belanja pada semester II akan lebih tinggi. Sehingga, seluruh belanja yang dianggarkan dalam APBN-P tahun ini bisa terserap.

Chatib berjanji akan meningkatkan komunikasi serta mempermudah prosedur pencairan anggaran.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, persyaratan dokumen yang harus disiapkan kementerian akan dikurangi. Tidak sebanyak dokumen *term of reference* (TOR) dan rincian anggaran belanja (RAB).

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Noor Supit menyatakan, rendahnya penyerapan pada semester I menunjukkan tidak adanya perbaikan dari pemerintah dalam mengelola anggaran. "Kita masih terbiasa dengan penyerapan yang luar biasa besar di semester kedua. Bahkan, kadang-kadang tiga



bulan terakhir. Perilaku ini harus kita ubah," ujarnya.

Senada dengan Ahmad, anggota Banggar Dolfir Othniel Frederic Palit juga mempertanyakan realisasi tersebut. Dolfir juga menyayangkan konsep pemberian hadiah dan sanksi tidak cukup efektif mendorong kementerian untuk memperbaiki penyerapan anggarannya. "Justru sekarang lebih buruk dibanding sebelumnya," ujarnya.

Ekonomo Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, dalam lima tahun terakhir, sekitar Rp 100 triliun anggaran gagal diserap. Menurutnya anggaran yang tak terpakai itu membuat daya beli masyarakat turun. "Tanpa perbaikan penyerapan anggaran, negara ini hanya menunggu momentum penurunan ekonomi," ujarnya. ■ ed: fitria andayani